

# LARWASDA

GELAR PENGAWASAN DAERAH



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

YOGYAKARTA, 28 MARET 2022

# PERAN APIP DI KOTA YOGYAKARTA

## ASSURANCE

- **AUDIT** KINERJA/OPERASIONAL/DENGAN TUJUAN TERTENTU
- **REVIU** DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, DOKUMEN PENGANGGARAN, PENYERAPAN ANGGARAN, KINERJA, PENGADAAN BARJAS, DAK FISIK/NON FISIK, LKPD, LPPD, PEER REVIU, ROTASI MUTASI ASN, KETUGASAN MANDATORI LAIN
- **MONEV** TL PEMERIKSAAN EKSTERNAL /INTERNAL, PM REFORMASI BIROKRASI, LAPORAN PENANGANAN GRATIFIKASI/WBS/BENTURAN KEPENTINGAN, SAKIP, MATURITAS SPIP, ZI, LHKASN, STOK OPNAME, AKSI PENCEGAHAN KORUPSI, MCP KPK, OPTIMALISASI PAD, PELAYANAN PUBLIK, PERENCANAAN & PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER, SABER PUNGLI
- **PPI**

## CONSULTING

- ✓ **PENDAMPINGAN**
- ✓ **KLINIK KONSULTASI**
- ✓ **SOSIALISASI**

## PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)
2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)
3. Komponen Kualitas Pengawasan (*Result*)



A close-up photograph of a person's hands in a white shirt. The person is holding a magnifying glass with a gold rim over a document in a binder. The document has some text and a table. The person's left hand is resting on the document, and their right hand is holding the handle of the magnifying glass. The background is dark and out of focus.

HASIL PELAKSANAAN AUDIT KINERJA &  
AUDIT OPERASIONAL  
**2021**

# HASIL PELAKSANAAN AUDIT KINERJA 2021

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jml LHP</b>	<b>Temuan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>STATUS Selesai</b>	<b>Hal2 yg perlu perhatian</b>	<b>Saran</b>	<b>STATUS Selesai</b>
<b>1</b>	<b>Sem I</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Sem II</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

# HASIL PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 2021

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jml LHP</b>	<b>Temuan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>STATUS Selesai</b>	<b>Hal2 yg perlu perhatian</b>	<b>Saran</b>	<b>STATUS Selesai</b>
1	Sem I	0	0	0	0	0	0	0
2	Sem II	4	2	5	5	4	6	6
	JUMLAH	4	2	5	5	4	6	6

# AUDIT OPERASIONAL 2021

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian :

1. Pengurus Barang Pembantu belum mencatat barang inventaris yg diterima ke dalam KIR;
2. Terdapat asset kendaraan yang tidak dimanfaatkan;
3. Penatausahaan barang persediaan belum dilaksanakan secara akurat;
4. Terdapat tahapan pengadaan barang yang belum dilaksanakan (tidak ada data pembanding dari penyedia lain);
5. Terdapat pegawai yang tidak hadir & melaksanakan tugas;

Temuan :

1. Terdapat penggunaan rekening pribadi untuk transaksi keuangan penerimaan dan belanja daerah;
2. Terdapat kesalahan penganggaran & kelebihan pertanggungjawaban belanja modal.


# AUDIT KINERJA 2021

## TEMUAN :

1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan;
2. Terdapat pengadaan barang yang belum menggunakan HPS;
3. Pelaksanaan pembahasan anggaran tidak didukung dokumentasi yang memadai;
4. Laporan mutasi barang inventaris dan persediaan smester belum dibuat.

## Hal-hal yang perlu mendapat perhatian :

1. SOP Pelayanan belum diupdate;
2. Indikator kinerja kegiatan dalam dokumen perencanaan dan pengukuran tidak konsisten;
3. Terdapat ketidakselarasan antar dokumen kinerja;
4. Pengelolaan barang daerah belum didukung prosedur yang memadai.

A photograph of a business meeting around a wooden table. A laptop is open on the left, displaying a dashboard with charts. Several people's hands are visible, some holding pens and looking at documents. The scene is overlaid with a semi-transparent dark blue diamond shape containing white text.

**PENGAWASAN  
DENGAN TUJUAN  
TERTENTU  
(PDTT)**



# HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU 2021

NO	Uraian	Jml LHP	Temuan	Rekomendasi	STATUS Selesai	Hal2 yg perlu perhatian	Saran	STATUS Selesai
1	Sem I	12	0	0	0	23	19	19
2	Sem II	19	1	2	2	30	35	33
	JUMLAH	31	1	2	2	53	54	52

# Jumlah PDTT

## Audit : 26 laporan

- Audit vaksinasi
- Probitas audit
- Tematik DAKEL
- Tematik DAIS
- Tindak lanjut aduan Pokja PBJ

## Reviu : 8 laporan

- Reviu realisasi PBJ
- Reviu pengelolaan barang persediaan
- Reviu dana hibah pariwisata
- Reviu UKPBJ

## Evaluasi : 4 laporan

- Evaluasi pelaksanaan RTP 2020

## Pengawasan lain : 3 laporan

- Pemeriksaan usulan daftar hitam
- Penjaminan kualitas PM Maturitas SPIP

# Hasil audit tujuan tertentu yang menonjol :

## Audit vaksinasi

- Tidak ada temuan fraud
- Hal perlu perhatian antara lain : pencatatan SMILE kurang tertib, peralatan kurang memenuhi standar (pengatur suhu penyimpanan vaksin), inefisiensi penggunaan vaksin
- Vaksin tidak memiliki Vaccine Vial Monitor (VVM) untuk memantau tingkat keterpaparan vaksin terhadap panas

## Probity audit

- Kurangnya pengendalian PPKom pada pelaksanaan pekerjaan (cacat mutu pengadaan barang, mutu konstruksi kurang dapat diyakini, pengawasan pekerjaan konstruksi kurang)
- Penyusunan HPS kurang sesuai peraturan
- Penggunaan akun e purchasing tidak mutakhir

## ADTT tindak lanjut aduan Pokja

- Pokja Pemilihan 37 Putaran VII pada BPBJ telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya
- Mengakui bahwa dalam evaluasi penawaran PT PYK selaku pemenang tender maupun saat pembuktian kualifikasi tidak menanyakan surat referensi PPK
- Tidak ada unsur kesengajaan
- Melanggar kode etik

# Hasil reviu yang menonjol :

## Realisasi PBJ

- Paket terlambat diserahkan ke BPBJ, jadwal mundur
- Proses pemilihan lebih lama dari jadwal
- Pekerjaan putus kontrak

## Pengelolaan barang persediaan

- Pencatatan persediaan menggunakan SIMBARA dan manual
- Pencatatan kurang update
- Belum ada SOP mengatur pelaporan dan pencatatan barang di bidang khususnya di DPUPKP

## Reviu UKPBJ

- Tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai BPBJ sebesar 50 % dan tingkat pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengadaan barang/jasa sebesar 84.12%
- Tusi telah selaras dengan peraturan PBJ, Sudah ada kode etik dan SOP
- Nilai PBJ tahun 2021 yang diunggah ke aplikasi SIRUP sebesar 97.75% dari total nilai anggaran belanja APBD 2021 dan 89.13% dari total nilai anggaran belanja pada Perubahan APBD 2021
- Selesai proses pemilihan pada Pokja PBJ sebanyak 130, terdiri dari 104 tender (80%) tepat waktu dan 26 tender (20%) terlambat dari jadwal yang direncanakan dengan efisiensi sebesar 17.51%

# Hasil pengawasan lain yang menonjol

## Pemeriksaan usulan daftar hitam

- Penyedia benar-benar tidak memenuhi kewajibannya
- Proses yang dilakukan PPKom sudah sesuai peraturan

## Penjaminan kualitas atas PM maturitas SPIP

- Diuraikan lebih detail pada bagian SPIP

# Hasil evaluasi RTP yang menonjol :

- ✓ Penilaian risiko dan penyusunan RTP untuk kegiatan di tahun 2020 belum mencakup seluruh kegiatan utama di PD.
- ✓ Sebagian besar RTP yang disusun sudah dilaksanakan secara efektif, namun secara dokumentasi masih ada yang belum sesuai
- ✓ Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan RTP
  - 1) koordinasi yang baik dan pendampingan personil yang melaksanakan pengendalian
  - 2) membangun sistem untuk mendukung pelaksanaan pengendalian baik sistem kerja manual maupun sistem informasi secara online
  - 3) personil yang kompeten dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian
- ✓ Faktor penghambat pelaksanaan RTP
  - 1) RTP yang disusun tidak sesuai dengan tujuan dan risiko yang diidentifikasi
  - 2) Sarana prasarana dan anggaran yang kurang mencukupi
  - 3) Masih ada pengendalian yang disusun bukan merupakan wewenang dari pemilik risiko
  - 4) Munculnya risiko baru yang belum teridentifikasi sebelumnya

# Auditor Eksternal



No	Nama Pemeriksa	Judul Pemeriksaan, No LHP, Tanggal	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjutan
1	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN DIY	1 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kinerja Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Pengkreditan BPR Bank Jogja Tahun Buku 2020&2021 24/LHP/XVIII.YOG/09/2021 Tanggal 10 September 2021	5	13	13
		2 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 (LKPD) 02B/LHP/XVIII.YOG/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021	4	8	8



No	Nama Pemeriksa	Judul Pemeriksaan, No LHP, Tanggal	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjutan	
2	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1	Laporan Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021 Pada Kota Yogyakarta LEV-122/PW12/2/2021 Tanggal 22 Juni 2021	1	4	4
		2	Laporan Hasil Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Tahun 2018 s.d 2021 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta LEV-127/PW12/3/2021 Tanggal 24 Juni 2021	1	6	6

No	Nama Pemeriksa	Judul Pemeriksaan, No LHP, Tanggal		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjutan	
3	INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1	Laporan Hasil Pemeriksaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta TA 2021	4	9	9	
			701/X.REG/08/PM/2021				
			Tanggal 16 November 2021				
		2	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta TA 2021	3	6	6	
			781/X.REG/05/SP/2021				
			Tanggal 10 November 2021				
		3	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta TA 2021	2	4	4	
	791/X.REG/14/SP/2021						
	Tanggal 18 November 2021						



**E SPIIP  
PENILAIAN  
BASELINE  
2021**

# E SPIP

- Penilaian maturitas SPIP baru, yang terintegrasi dengan penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan IEPK (Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi)
- Melalui aplikasi e SPIP
- Tahun 2021, dinilai baseline atau nilai awal terhadap 10 OPD sampel pengampu 4 sasaran strategis Pemkot
- Keempat sasaran strategis yang dinilai keberhasilannya adalah :
  - 1) Pertumbuhan ekonomi meningkat;
  - 2) Kualitas pendidikan meningkat;
  - 3) Harapan hidup masyarakat meningkat;
  - 4) Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

# Hasil penilaian

No	Komponen Penilaian	Skor PM OPD	Skor PK	Skor Evaluasi BPKP
1.	Penetapan Tujuan	2,000	2,000	1,200
2.	Struktur dan Proses	0,933	0,830	0,690
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,185	1,125	1,310
A.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,118	3,928	3,200
B.	MRI	3,920	3,340	2,490
C.	IEPK	3,420	2,070	2,430

# Ringkasan hasil

- Penetapan tujuan sudah baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan :
  - a. Penetapan target sasaran strategis masih ada yang belum SMART-C yaitu pada sasaran “Pertumbuhan ekonomi meningkat” masih berupa rentang nilai 4,04% – 4,21%.
  - b. Sasaran PD Inspektorat berupa “Maturitas SPIP meningkat” seharusnya merupakan indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta.
  - c. Salah satu penetapan sasaran program di Bappeda yaitu “Kemanfaatan penelitian dan pengembangan” belum spesifik.
  - d. Salah satu sasaran program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu “Pengelolaan Kearsipan Meningkat” masih belum SMART-C karena masih sama untuk sasaran program maupun sasaran kegiatan.
- Struktur dan proses secara umum sudah ada kebijakan, sosialisasi dan penerapan kebijakan, namun belum dievaluasi secara berkala. Kebijakan manajemen risiko belum sampai tingkat strategis Pemkot.
- Pencapaian tujuan sudah baik, namun masih ada catatan tentang pengelolaan aset

# Reformasi Birukrasi



# Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## Sasaran

- Pemerintah Kota Yogyakarta
- 50 OPD

## Hasil

- Pemerintah Kota Yogyakarta (79,98%)
- Rata-rata OPD (67,67%)

## Sebaran Nilai OPD

- Tertinggi : Bagian Organisasi (97,39%)
- Inspektorat (92,39%)
- Terendah : BPBD (36,23%)



# Kesimpulan PMPRB 2021

- a. Secara umum pelaksanaan RB sudah berjalan dengan baik untuk tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta, namun belum dipahami dan terinternalisasi di tingkat Perangkat Daerah
- b. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki nilai capaian optimal pada area Manajemen Perubahan, area Penataan dan Penguatan Organisasi, dan area Penguatan Akuntabilitas
- c. Kebijakan reformasi birokrasi pada area Deregulasi Kebijakan dan area Penguatan Pengawasan perlu diimplementasikan dengan lebih baik lagi di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan tingkat Perangkat Daerah

**INTEGRITY**

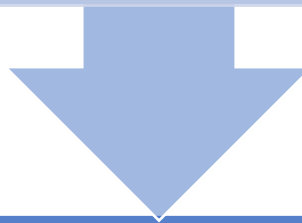
**Pembangunan  
Zona Integritas**



# Pembangunan Zona Integritas

Pedoman

PerMenPANRB Nomor 10 Tahun 2019



OPD Usulan

Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil untuk usulan  
WBBM

Kemantren Wirobrajan  
untuk usulan WBK

Kemantren Gondokusuman  
untuk usulan WBK

# Catatan Pelaksanaan Pembangunan ZI

- a. Pengusulan dan pengisian Lembar Kerja Evaluasi ZI dilakukan secara online lewat sistem <https://pmpzi.menpan.go.id> untuk nantinya akan dilakukan evaluasi secara online oleh Tim Penilai Nasional
- b. Sebelum OPD diusulkan dalam penilaian ZI secara nasional, Tim dari Inspektorat Kota Yogyakarta telah melakukan pendampingan dan penilaian internal
- c. Dari 1 usulan untuk WBBM dan 2 usulan untuk WBK tidak ada yang lolos di penilaian Nasional
- d. Kendala ada di kesiapan OPD yang hendak diusulkan dan nilai survei persepsi anti korupsi pengguna layanan Perangkat Daerah (masyarakat) yang tidak memenuhi standar penilaian
- e. Pada 31 Desember 2021 telah dikeluarkan PerMenPANRB No 90 TAHUN 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah untuk dapat digunakan pada tahun 2022



# **MCP KPK DI KOTA YOGYAKARTA**

# Capaian MCP 2021

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD (100)

- Standar Satuan Harga (100)
- Analisis Standar Biaya (100)
- Penganggaran (100)
- Pengawasan (100)

## PENGADAAN BARANG DAN JASA (89.82)

- SDM UKPBJ (92.8)
- Pelaksanaan Tupoksi (81.8)
- Perangkat Pendukung (100)
- Penayangan SIRUP (90)
- Pengendalian dan Pengawasan (87.5)

## PERIZINAN (91.97)

- Regulasi (87.4)
- Infrastruktur (100)
- Proses Perizinan (89)
- Pengendalian dan Pengawasan (93.88)

## PENGAWASAN APIP (78.07)

- Kapabilitas APIP (74.23)
- Sal. Pengaduan Masyarakat (100)
- Probity Audit (100)
- Pemeriksaan Khusus (0)
- TL Hasil Pemeriksaan (100)

# Capaian MCP 2021

**MANAJEMEN ASN  
(93.56)**

- Regulasi (100)
- Sistem Informasi (100)
- Kepatuhan LHKPN dan Pengend. Gratif (100)
- Tata Kelola ASN (100)
- Pengawasan (72)

**OPTIMALISASI  
PAJAK DAERAH  
(77.94)**

- Database (91)
- Inovasi Peningkatan Pajak (100)
- Penagihan Tunggakan Pajak (12)
- Peningkatan Pajak (100)

**PENGELOLAAN  
BMD (80.35)**

- Database (88.2)
- Pengelolaan Aset (100)
- Sertifikasi Aset (42)
- Penertiban Aset (100)

# Catatan MCP


- a. Pemenuhan bukti dukung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan penilaiannya secara online per tribulan oleh KPK dilakukan lewat sistem <https://jaga.id/monitoring>
- b. Untuk SSH dan HSPK hanya menetapkan formula perhitungan biaya, agar pada tahun 2022 dapat dibuat lebih spesifik dan rinci penjumlahannya sehingga lebih akurat pada saat input perencanaan
- c. Belum ada Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur)
- d. Belum ada Evaluasi penayangan SIRUP dengan membandingkan data seluruh Belanja yang Melibatkan Pihak Ketiga dengan data penayangan dalam SIRUP
- e. Belum seluruh Vendor dinilai kinerjanya
- f. Input SIRUP masih belum akurat
- g. RDTR belum turun dari pusat
- h. Tidak ada Audit Khusus terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- i. Dashboard data atas wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, sesuai SOP agar dapat diintegrasikan dengan SKPD yang melakukan penertiban misalkan satpol pp seperti apa integrasi informasinya. Yang sudah ada adalah data alat rekam, tidak terkait dengan tunggakan pajak
- j. Capaian Penagihan Tunggakan Pajak baru 11%
- k. Dari total aset bidang tanah 989 baru tersertifikasi 420 bidang tanah



**PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN  
(PKPT) TAHUN 2022  
BERBASIS RISIKO**




**Anggaran 2022**  
**Rp. 11.827.832.075**  
**(0,66 % dari APBD)**



**Rp. 11.815.479.075,-**  
**(untuk 3 program,**  
**10 Kegiatan, 36 Sub**  
**Kegiatan)**

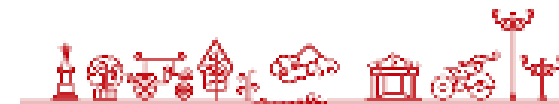
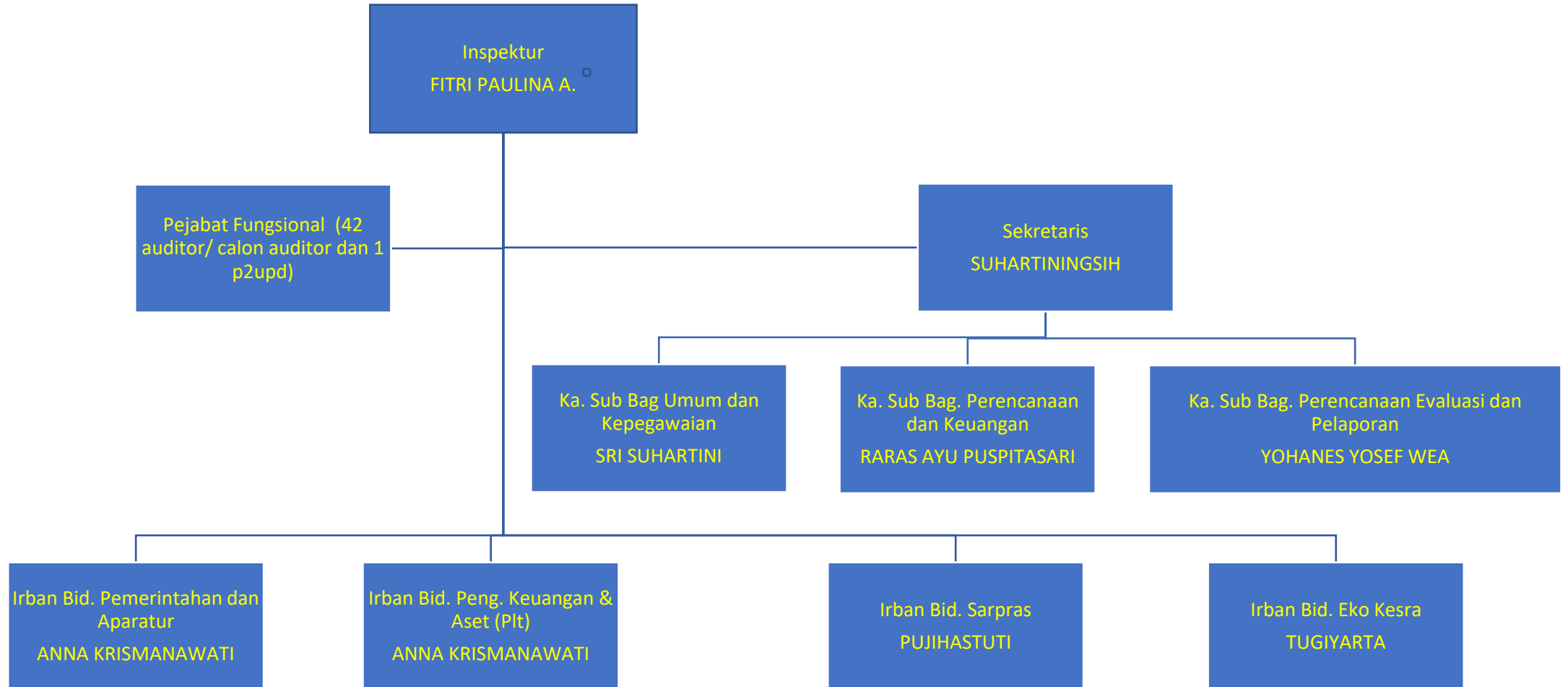
**Belanja Operasi**



**Rp. 12.353.000,-**  
**(untuk 1 Sub Kegiatan)**

**Belanja Modal**

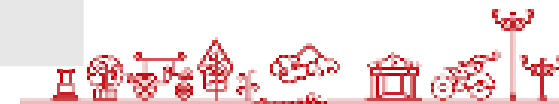
# Struktur Organisasi Inspektorat



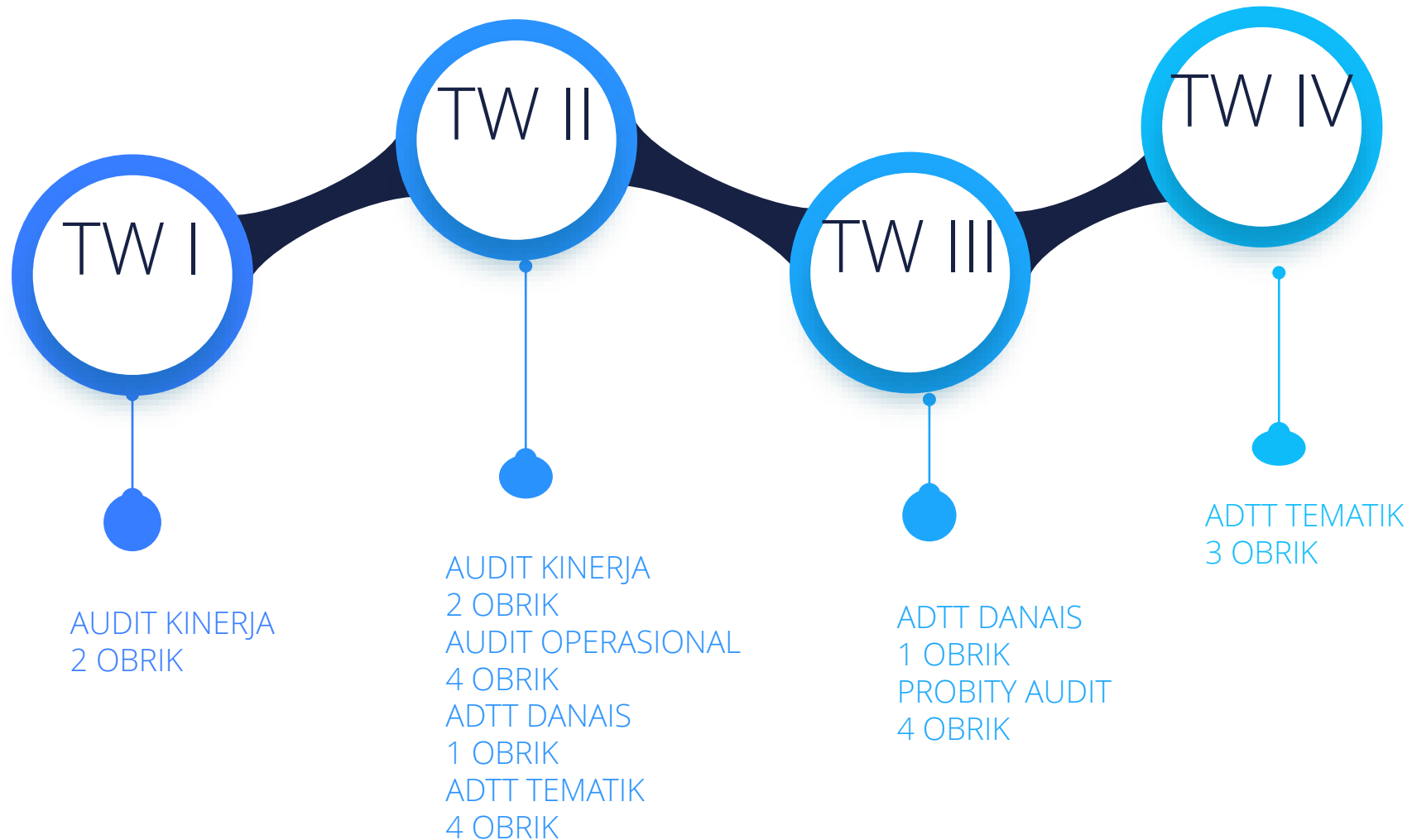
# Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan per Februari 2022

No	Jabatan	Formasi	Bezeting	Ket
1	Struktural	9	8	1 Plt. Irban Keuangan & Aset
2	Auditor	56	40	- 14
	CPNS Auditor		2	
3	P2UPD	5	1	- 4
4	Pranata Komputer	1	0	- 1
5	Fungsional Umum	32	11	- 21
	Jumlah	103	62	- 41

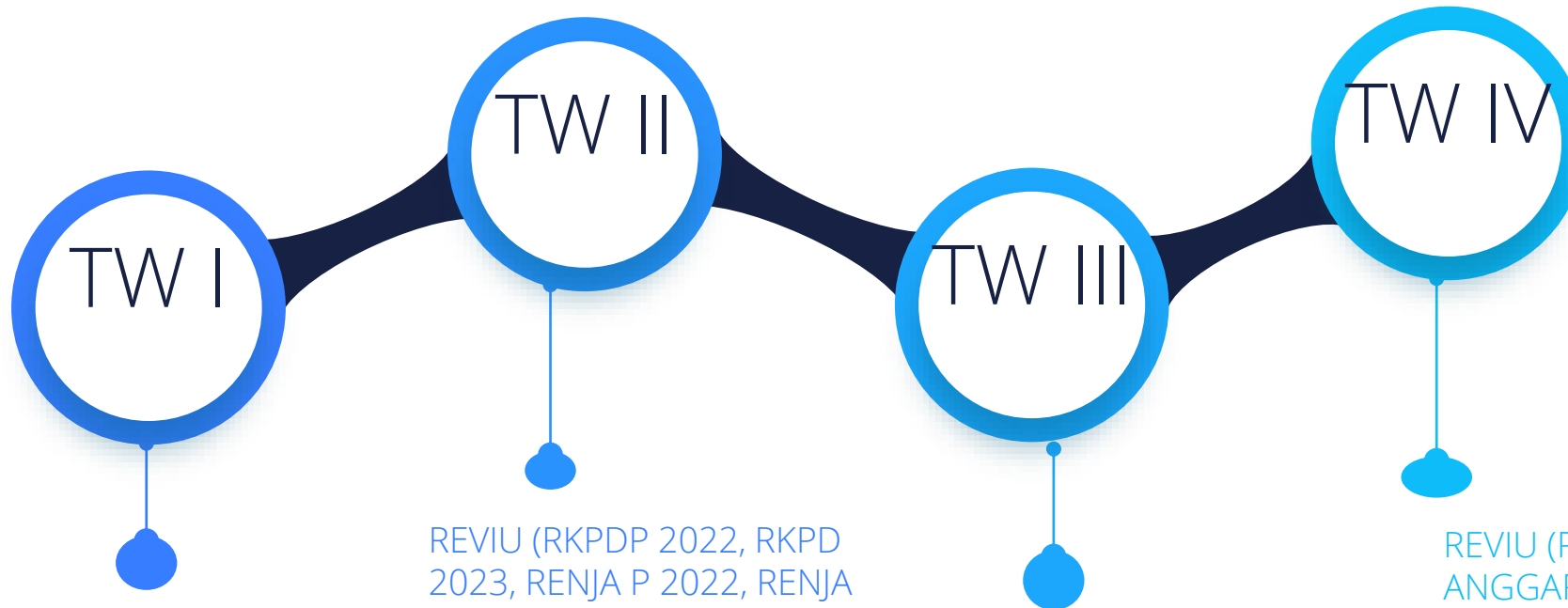
NB : Tenaga Teknis 3 Orang, tahun 2022 rencana penambahan CPNS 14 auditor, 4 P2UPD, 3 Fungsional Umum



# PENGAWASAN INTERNAL (audit)



# PENGAWASAN INTERNAL (selain audit)



REVIU (LPPD, SERAPAN ANG. PBJ, MCP KPK, PENYERAPAN ANGGARAN, OPTIMALISASI PAJAK DAERAH, LKPD 2021)  
EVALUASI (SAKIP, RB, GRATIFIKASI, LHKASN, PENGELOLAAN KEU ASET, TLHP)  
SOSIALISASI RTP  
PENDAMPINGAN MR

REVIU (RKPD 2022, RKPD 2023, RENJA P 2022, RENJA 2023, SERAPAN ANG. PBJ, MCP KPK)  
EVALUASI (RB, PMPRB, GRATIFIKASI, ZI, PENGELOLAAN KEU ASET, TLHP)  
PENDAMPINGAN MR

REVIU (RENJA 2023, SERAPAN ANG. PBJ, REVIU MCP KPK, KUA/PPAS 2023, KUA/PPAS P 2022, RKA 2023, RKA P 2022, PAJAK DAERAH)  
PENILAIAN MAT. SPIP  
PENDAMPINGAN MR  
TLHP

REVIU (PENYERAPAN ANGGARAN, OPTIMALISASI PAJAK DAERAH)  
EVALUASI (WBS, GRATIFIKASI, PENGELOLAAN KEU ASET)  
PENILAIAN SPIP  
PENDAMPINGAN MR  
TLHP

# Amanat MCP 2022 tugas pengawasan

## REVIU

- RKPD
- SSH, ASB dan HSPK
- KUA PPAS
- RKA – SKPD
- RKPA – SKPD
- LKPD
- Laporan Kinerja (LKj)
- Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBJ (per Triwulan)
- Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik
- Kinerja PBJ
- Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan
- Manajemen ASN
- Tata Kelola BMD
- Tata Kelola Pajak Daerah
- RPJMD

## Penilaian/Monitoring/Evaluasi

- PMPRB
- PMPZI
- Gratifikasi
- Benturan Kepentingan
- Monev BOS
- Monev sapu bersih pungutan liar

## AUDIT dan TL

- Audit berbasis risiko
- Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi (5)
- Probity Audit (5)
- Penanganan Covid-19
- TL perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi

# PENGAWALAN MONITORING CENTRE FOR PREVENTION

- Bekerja sama dengan Bagian Organisasi untuk menyusun Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Supervisi Pencegahan Korupsi Melalui Aplikasi Monitoring Centre For Prevention dan membentuk Tim Pembangun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- Menyiapkan *cloud drive* sebagai tempat pengumpulan bukti dukung pencegahan korupsi yang akan diunggah ke sistem sebelum nanti dinilai oleh KPK



# PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS

- Bekerja sama dengan Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dalam mempersiapkan OPD untuk PMPRB 2021
- Sosialisasi Zona Integritas dengan PerMenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 kepada seluruh OPD

# Saran Perbaikan Pelaksanaan RB

- a. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam reformasi birokrasi
- b. Melaksanakan sosialisasi dan penyusunan rencana reformasi birokrasi yang melibatkan seluruh anggota organisasi
- c. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas seluruh kebijakan yang berlaku dan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun di tingkat Perangkat Daerah
- d. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi terhadap pentingnya penguatan pengawasan di tingkat Perangkat Daerah
- e. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan yang lebih baik pada tingkat Perangkat Daerah

# PENILAIAN RB 2022

1. MARET : EVALUASI RB TRIWULAN I (DATA DIRANGKUM BAGIAN ORGANISASI);
2. DIHARAPKAN SEMUA OPD KOMITMEN MENINGKATKAN NILAI EVALUASI RB;
3. MEI : PENILAIAN RB OLEH TIM PENILAI INTERNAL SEBAGAI PERSIAPAN EVALUASI DARI KEMEN PAN RB (DIHARAPKAN OPD MEMPERSIAPKAN DIRI MENGUMPULKAN BUKTI DUKUNG)



**RENCANA AKSI  
PELAKSANAAN SPIP  
TERINTEGRASI**

# Rencana aksi

Unsur penilaian	Saran	Rencana pelaksanaan
<b>Penetapan tujuan</b>	Memperbaiki penyusunan indikator dan target kinerja sasaran strategis, baik di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun di tingkat OPD	Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra 2023 - 2026
	Menyesuaikan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan sehingga mendukung secara langsung capaian sasaran strategis yang ditetapkan	Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra 2023 - 2026

# Rencana aksi

Unsur penilaian	Saran	Rencana pelaksanaan
<b>Struktur dan proses</b>	Menyusun kebijakan manajemen risiko untuk risiko strategis tingkat Pemkot, risiko strategis tingkat OPD dan risiko operasional	Dalam proses, akan disampaikan ke manajemen Pemkot pada Februari ini
	Membentuk struktur pengelola risiko baik di tingkat Pemkot maupun di tingkat OPD	Setelah pedoman manajemen risiko ditetapkan
	Melakukan penilaian risiko dan menyusun RTP sesuai pedoman manajemen risiko	Setelah pedoman manajemen risiko ditetapkan
	Mengkomunikasikan kebijakan yang ditetapkan serta melakukan pemantauan atas pelaksanaannya	Setelah pedoman manajemen risiko ditetapkan

# Rencana aksi

Unsur penilaian	Saran	Rencana pelaksanaan
<b>Struktur dan proses</b>	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maupun atas pelaksanaan kebijakan tersebut	Bertahap sesuai tupoksi masing-masing PD
	Menyusun kebijakan pencegahan korupsi dan menerapkan kebijakan tersebut secara memadahi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	Semester II Tahun 2022 atau Tahun 2023

# Rencana aksi

Unsur penilaian	Saran	Rencana pelaksanaan
Hasil pencapaian tujuan	Meningkatkan pengendalian pada pengelolaan keuangan sehingga tidak ditemukan lagi permasalahan pada pengelolaan keuangan	BPKAD : Inspektorat : pemantauan atas pengelolaan keuangan
	Meningkatkan pengendalian tata kelola aset dengan perbaikan administrasi dan pengamanan aset	BPKAD : Inspektorat : pemantauan atas pengelolaan aset



# Percepatan penilaian maturitas SPIP melalui aplikasi

---

## Progres

OPD selesai melaksanakan penilaian mandiri (PM) 15%

---

## Kendala

Aplikasi yang belum sepenuhnya dipahami dan masih ada perbaikan dari BPKP

Waktu akhir tahun dan awal tahun bersamaan penyelesaian pekerjaan, pelaporan keuangan dan kinerja

Kurangnya dukungan personil untuk pengisian /penyelesaian PM di OPD

Kurang koordinasi antar PM Pemkot untuk mendorong PM OPD

Pergantian personil karena mutase/promosi

---

## Tata kala

Penyelesaian PM : akhir Februari

Penyelesaian PK : Maret

---

## Rencana perbaikan PM Tahun 2022

Persiapan bahan yang dibutuhkan

Penyusunan tim yang lebih baik

Sosialisasi ulang konsep dan proses PM khususnya untuk personil yang baru

Pengaturan waktu yang lebih tertata

---

# Amanat MCP 2022 untuk APIP

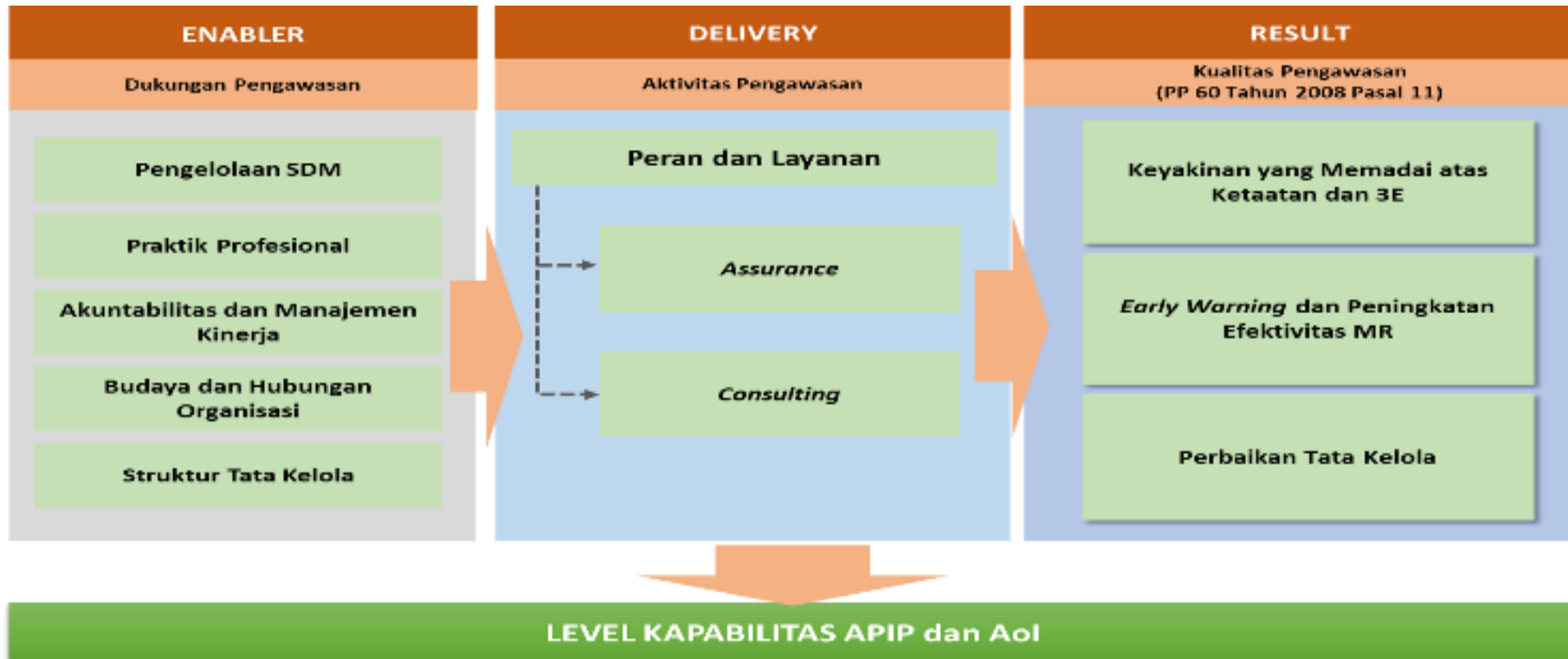
- Anggaran APIP 0,75% dari total belanja daerah (PerMenDagri No. 27 Tahun 2021)
- TPP APIP di atas OPD lain, namun di bawah Sekda (secara berjenjang) – berdasarkan PerMenDagri 27 Tahun 2021
- Terdapat anggaran untuk pelatihan dan sarana & prasarana yang dikelola oleh APIP secara mandiri
- Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
- Perkada OTK Inspektorat yang menyatakan adanya inspektur pembantu (inspektur khusus/ investigasi)
- Perkada tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi intern inspektorat
- Perkada Pedoman Pengelolaan Resiko
- Perkada Pedoman Pemeriksaan Kinerja
- Risk Register pada masing-masing Perangkat Daerah
- Perkada tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah
- Maturitas SPIP
- SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan
- Daftar dan peta risiko kecurangan

An illustration of a man in a dark suit, light blue shirt, and striped tie, wearing glasses. He is holding a magnifying glass over his chest. Surrounding him are various business-related items: a yellow folder with a green checkmark, a clipboard with a bar chart, a black calculator, a black pen, and an orange pencil. The background is a teal color with a subtle pattern of diagonal lines and the word 'VectorStock' repeated in a light green font.

# PENINGKATAN KAPABILITAS APID

# Kerangka Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

- Komponen Penilaian Kapabilitas APIP
  1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)
  2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)
  3. Komponen Kualitas Pengawasan (*Result*)



# Pembobotan Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

		Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> ) 60%					Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> ) 40%
ELEMEN		PENGELOLAAN SDM (30%)	PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	PERAN DAN LAYANAN APIP
TOPIK		Perencanaan SDM APIP	Perencanaan Pengawasan	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Mekanisme Pendanaan	Audit Ketaatan ( <i>Compliance Auditing</i> )
				Pelaksanaan Anggaran	Hubungan APIP dengan Manajemen	Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	Audit Kinerja ( <i>Performance Auditing</i> )
		Pengembangan SDM Profesional APIP	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Hubungan Pelaporan	<i>Assurance</i> atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D ( <i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i> )
				Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D			Jasa Konsultansi ( <i>Advisory Services</i> )

# Karakteristik Level

## OPTIMIZED (Level 5)

APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## INSTITUTIONALIZED (Level 4)

APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

## DELIVERED (Level 3)

APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.

## STRUCTURED (Level 2)

APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.

## INITIAL (Level 1)

Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.

Terima kasih!

